

LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KABUPATEN DONGGALA

Q. Dasar Pelaksanaan:

- Surat Perintah Tugas Nomor: / /DKIPS Tanggal Maret 2023
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: /SPPD/DKIPS, Tanggal Maret 2023. atas nama H. ABBAS H.A RAHIM, SH., MED
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, Nomor: /SPPD/DKIPS, Tanggal Maret 2023 atas nama Dr.JEFIT SUMAMPOUW,SE.,M.Th.,M.Mis
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: /SPPD/DKIPS, Tanggal Maret 2023. atas nama RIDWAN LAKI, S.PD., M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: /SPPD/DKIPS, Tanggal Maret 2023 atas nama HENNY HASNA INGOLO, S.Sos.,M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: /SPPD/DKIPS, Tanggal Maret 2023. atas nama SUSTRISNO YUSUF, SH., M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: /SPPD/DKIPS, Tanggal Maret 2023. atas nama YESSY CHORNELIA, S.Ip., M.Si.

R. Maksud dan Tujuan:

7. Pelaksanaan Monev Badan Publik ini adalah untuk mengetahui dan mengukur Pelaksanaan keterbukaan informasi public, khususnya

keberadaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Donggala.

- 8. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik serta menjadi bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasim publik di Kabupaten Donggala
- 9. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID tentang keterbukaan informasi publik dan diharapkan PPID dapat mengidentifikasi, menginventarisasi, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Donggala.

S. Tempat pelaksanaan:

- Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Donggala.
- T. Waktu Pelaksanaan
 - Tanggal 16-18 Maret 2023

U. Sumber Dana :

Bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023,Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPP) Nomor: DPA/A.I/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2022, Tanggal 7 Januari 2022

V. <u>Deskripsi Singkat</u>:

- 7. Setiap Orang / warga Negara ,atau sekelompok orang berhak memperoleh informasi publik karena keterbukaan informasi merupakan ciri penting sebuah negara demokrasi.
- 8. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publiK dilakukan kepada badan publiK baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi public melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- 9. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimilik oleh badan public sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, dengan keberadaan PPID

maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

W. Hasil Yang diperoleh :

- 9. Berdasarkan hasil monev Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala bahwa pemerintah daerah Kabupaten Donggala bersedia mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi public dan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undangundang nomor 14 tahun 2008.
- 10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Dinas KOMINFO Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah.
- 11. Masih minimnya anggaran dan vasilitas pendukung PPID Utama Maupun PPID pelaksana dalam menjalankan keterbukaan informasi di Kabupaten Donggala.

X. Rekomendasi

- 9. Pemerintah daerah perlu memberikan support anggaran untuk PPID utama Maupun PPID pelaksana yang ada di Kabupaten Donggala sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
- 10. Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumensi dan tidak melakukan mutasi pada pejabat yang bersangkutan dalam rentang waktu yang singkat.
- 11. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala dapat menyiapkan ruang khusus PPID utama dan PPID Pelaksana lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan,
- 12. Melengkapi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis website sehingga mudah diakses oleh masyarakat

Monitoring Dinas Kominfo Kabupaten Toli-toli

